



KABUPATEN SUMBAWA

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2023



(0371) 2620594



infobnn_kab_sumbawa



info BNN Kabupaten Sumbawa



infobnn_kab_sumbawa



Bnnk Sumbawa

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 dapat kami selesaikan.

Rencana Kinerja Tahunan BNN Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 memuat rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta rencana sumber pembiayaannya. Rencana Kinerja Tahunan BNN Kabupaten Sumbawa merupakan hasil sinkronisasi dengan Rencana strategis BNN tahun 2020-2024 yang memiliki nilai strategis dalam memperkuat kapasitas dan infrastruktur BNN untuk menghadapi dinamika ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Rencana Kinerja Tahunan ini adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BNN Kabupaten Sumbawa sebagai unsur penunjang BNN RI dalam penyelenggaraan upaya P4GN di Kabupaten Sumbawa.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan menjadi landasan terwujudnya perencanaan makro yang berkualitas, aspiratif, partisipatif, terkendali dan akuntabel yang disertai penelitian dan pengembangan yang mendukung pencapaian kinerja pembangunan daerah.

Rencana Kinerja ini disusun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sehingga akan terjawab tantangan dan permasalahan perencanaan pembangunan dengan paradigma baru yang mengintegrasikan aspirasi masyarakat dan kebutuhan organisasi. Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna.

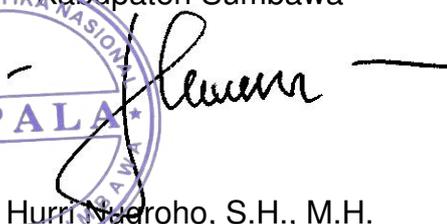
Demikian Rencana Kinerja Tahunan BNN Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 ini disusun. Kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Rencana Kinerja Tahunan ini sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan RKT ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Sumbawa Besar, 28 Desember 2022

Kepala Badan Narkotika Nasional

Kabupaten Sumbawa




Hurri Nugroho, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Kondisi Umum..... | 1 |
| B. Landasan Hukum..... | 9 |
| | |
| BAB II RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN | 10 |
| | |
| BAB III PENUTUP | 12 |
| | |
| Lampiran 1 Matrik Rencana Volume Rincian Output BNNK Sumbawa Tahun 2023 | 13 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

1. Permasalahan

Narkoba merupakan ancaman terhadap ketahanan nasional termasuk didalamnya ketahanan daerah. Hal ini dikarenakan daya rusak narkoba yang sangat kompleks dimana berdampak buruk terhadap kesehatan pengguna, kehidupan sosial kemasyarakatan, meningkatkan tindak kriminalitas, menurunkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan berujung pada penurunan kualitas dan daya saing bangsa.

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia terus meningkat. Hal ini dapat dilihat dari angka prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia yang meningkat di tahun 2021, dimana pada tahun 2019 berhasil ditekan. Indonesia saat ini juga menjadi pasar terbesar penjualan dan peredaran narkoba di Asia. Hal tersebut didukung oleh kondisi geografis berupa negara kepulauan dimana jalur laut sering dimanfaatkan untuk penyelundupan narkoba, jumlah penduduk yang banyak, harga narkoba yang mahal di Indonesia dibandingkan negara lain, dan tingkat permintaan yang terus meningkat.

Kabupaten Sumbawa merupakan Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki kondisi geografis yang strategis untuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Apalagi didukung dengan sektor pariwisata yang terus berkembang dan penduduk yang didominasi oleh usia kerja. Faktor tersebut mendorong peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sumbawa terus meningkat seiring peningkatan kasus narkoba secara nasional. Kondisi tersebut juga mendorong tingginya angka kriminalitas di Kabupaten Sumbawa.

Penanganan narkoba di Indonesia khususnya di Kabupaten Sumbawa perlu terus ditingkatkan mengingat dampak buruk narkoba bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jumlah kasus narkoba harus terus ditekan. Perang Terhadap Narkoba harus terus dilakukan demi mewujudkan

Sumbawa yang bebas dari narkoba dan “Sumbawa Gemilang Yang Berkeadaban” (Visi Bupati Sumbawa) serta meningkatkan ketahanan daerah Kabupaten Sumbawa. Kajian ini akan membahas tentang bagaimana upaya meningkatkan kualitas P4GN di Kabupaten Sumbawa sebagai bentuk perang melawan narkoba yang diarahkan untuk menjawab pertanyaan kajian gambaran penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Kabupaten Sumbawa, upaya P4GN yang telah dilakukan dan bentuk optimalisasi P4GN yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas P4GN di Kabupaten Sumbawa.

Terdapat sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan prioritas penanganan oleh BNN Kabupaten Sumbawa, dimana permasalahan-permasalahan ini dapat menjadi hambatan dalam upaya pencapaian tujuan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Kabupaten Sumbawa adapun sejumlah permasalahan tersebut adalah:

a. Problematika pengawasan peredaran.

Lebih lanjut, isu strategis problematika pengawasan peredaran narkoba dapat diinventarisir sebagai berikut:

- 1) Lemahnya pengawasan kejahatan narkoba di lembaga pemasyarakatan.
- 2) Lemahnya pengawasan peredaran gelap narkoba pada jalur tidak resmi.
- 3) Banyaknya jalur lintas batas tidak resmi sebagai pintu keluar masuk antar pulau.
- 4) Tidak adanya Seksi pemberantasan BNNK Sumbawa dan tidak adanya peralatan pendukung antara lain seperti alat Mobile EX-Ray (Seaport), Direction Finder (DF), dan lain-lain. xx

b. Rendahnya daya dukung eksternal masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Problematika pengawasan peredaran diperparah oleh rendahnya daya dukung eksternal dari masyarakat dan Pemerintah Daerah, yang antara lain:

- 1) Pelaksanaan program Desa Bersinar dan Kota Tanggap Ancaman Narkoba belum dilaksanakan secara terintegrasi termasuk pelaksanaan

IBM pada satu lokasi yang sama, serta belum memanfaatkan digitalisasi dalam pelaksanaannya.

2) Kurangnya dukungan regulasi, sistem informasi, blueprint pelaksanaan program Desa Bersinar dan Kota Tanggap Ancaman Narkoba, serta kolaborasi dengan pemangku kepentingan termasuk swasta.

3) Perlunya sistem teknologi informasi guna mendukung dan mempermudah pelayanan P4GN kepada publik baik dalam penyuluhan, rehabilitasi, pembuatan SKHPN, dan dalam pelaksanaan TAT.

4) Daya tarik nilai ekonomi narkoba yang tinggi sehingga menarik masyarakat untuk terus memperdagangkan narkoba walaupun risiko hukum yang sangat tinggi.

5) Minimnya dukungan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk program dan dukungan sumber daya anggaran dan lainnya untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

c. Belum optimalisasi fungsi penguatan lembaga rehabilitasi dan penerapan rehabilitasi berkelanjutan.

Perlunya optimalisasi fungsi penguatan lembaga rehabilitasi dan penerapan rehabilitasi berkelanjutan disebabkan oleh beberapa hal berikut:

1) Masih banyak pecandu narkoba yang relaps setelah menjalani program rehabilitasi dan kembali menggunakan narkoba. Bahkan terjadi peralihan penggunaan jenis narkoba dari satu jenis ke jenis narkoba lainnya oleh kalangan pecandu narkoba.

2) Sebaran dan ketersediaan lembaga rehabilitasi yang masih belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa , sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan assessment penyalah guna narkoba di wilayah yang tidak tersedia lembaga rehabilitasi.

3) Kesepahaman kalangan aparat penegak hukum dalam penerapan hukuman rehabilitasi terhadap penyalah guna dan atau pecandu narkoba yang masih rendah sehingga upaya penyelamatan penyalah guna dan atau pecandu narkoba melalui rehabilitasi belum maksimal.

4) Perlunya monitoring dan evaluasi pelaksanaan IBM yang efektif secara digitalisasi.

5) Diperlukan integrasi data untuk mendukung kebutuhan internal maupun eksternal berupa database lidik sidik, database TAT, database klien rehab, data klien pascarehab, data prevalensi, data relawan, data penggiat, data IBM, serta data edukasi publik tentang narkoba.

2. Hasil Evaluasi

Permasalahan narkoba di Kabupaten Sumbawa harus ditangani secara serius, mengingat kondisi geografis dan demografis Kabupaten Sumbawa yang mendukung serta peningkatan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sumbawa dan Indonesia yang terus meningkat. Sasaran pembangunan nasional dalam penanganan permasalahan narkoba difokuskan pada upaya penguatan pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi dengan indikator penurunan angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba.

BNN Kabupaten Sumbawa menindaklanjuti sasaran pembangunan tersebut melalui beberapa upaya sebagai berikut :

a. Pencegahan

Kegiatan pencegahan dilakukan dengan tujuan untuk menekan sisi membangun kemampuan dan ketahanan diri masyarakat dari pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kegiatan ini dilakukan melalui :

- Mengembangkan sistem pertahanan diri (imunitas) masyarakat secara intensif melalui upaya promotif dan pengembangan kecakapan hidup sejak usia dini.
- Mengembangkan sistem deteksi dini penyalahgunaan narkoba di lingkungan keluarga, pendidikan, kerja, dan masyarakat.
- Mengoptimalkan peran serta instansi pemerintah, swasta, dan organisasi kemasyarakatan (agama, wanita, pemuda, profesi, dll) dalam kampanye masif anti narkoba.
- Mengembangkan pemberdayaan alternatif di daerah rawan peredaran gelap narkoba

b. Pemberantasan

Kegiatan pemberantasan ditujukan untuk pengungkapan dan penindakan sindikat kejahatan narkoba dengan menghukum berat dan menyita aset hasil kejahatan narkoba. Kegiatan ini dilakukan melalui :

- Memperkuat sistem interdiksi di wilayah jalur-jalur masuk (pelabuhan laut, bandara, dan lintas batas darat).
- Mengungkap jaringan tindak kejahatan narkoba hingga tuntas dan tegas.
- Menyita aset sindikat narkoba yang berasal dari tindak kejahatan narkoba.
- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas instansi dan lintas negara dalam rangka pengungkapan sindikat tindak kejahatan narkoba.

Upaya pencegahan dan pemberantasan yang dilakukan tersebut dilakukan dalam rangka menyeimbangkan penekanan baik sisi *demand* ataupun *supply*. Pada tataran implementasi, kegiatan pencegahan dan pemberantasan tersebut dapat dioptimalkan melalui beberapa strategi berikut :

- **Mendorong semua Kabupaten / Kota di Kabupaten Sumbawa untuk menyusun Perda P4GN di daerah**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika mengamanatkan Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi ataupun Kabupaten / Kota untuk menyusun penyusunan peraturan daerah mengenai P4GN. Pada tahun 2020 tepatnya 23 Desember 2020, Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah mengundang Pergub No 78 Tahun 2020 tentang fasilitasi P4GN. BNNK Sumbawa bersama- sama dengan Pemerintah Provinsi perlu mendorong semua Kabupaten/ Kota untuk menyusun Perda P4GN agar P4GN di daerah dapat dilaksanakan secara lebih optimal. Dengan adanya Perda P4GN di daerah diharapkan dapat mendorong :

- 1) Penyusunan Rencana Aksi P4GN di daerah

2) Pembentukan tim terpadu P4GN di tingkat kabupaten/kota, dan kecamatan.

Sampai dengan saat ini masih banyak Dinas/Instansi, Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sumbawa yang belum menindaklanjuti Permendagri Nomor 12 Tahun 2019. Pemerintah Kabupaten Sumbawa sudah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika. Misi Kabupaten Sumbawa keempat yaitu “Mewujudkan masyarakat yang beriman, berkarakter, terlaksananya ketentraman dan ketentuan umum dan terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan” melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah merupakan peluang untuk mendorong optimalisasi P4GN di daerah.

- **Penguatan kerjasama dengan Pemerintah Daerah**

Pemerintah daerah memiliki tupoksi penyelenggaraan P4GN di daerah yang berfokus pada upaya pencegahan. Tupoksi ini dijalankan oleh Kantor/ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk itu BNNK Sumbawa perlu meningkatkan kerjasama dengan Kantor/Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di daerah untuk bersama-sama menekan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Kabupaten Sumbawa.

- **Meningkatkan alternatif pendanaan dari swasta dan masyarakat**

Kampanye anti narkoba bisa disinergikan dengan berbagai kegiatan swasta, baik melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan maupun kampanye perusahaan tersebut untuk meningkatkan *brand awareness* perusahaan, seperti yang sudah mulai banyak dilakukan oleh sejumlah perusahaan.

Berbagai model alternatif pendanaan kampanye anti narkoba dengan menggunakan pendanaan dari swasta dan masyarakat masih perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan baik dengan berbagai komponen swasta yang lain, maupun dengan berbagai variasi model kampanyenya mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah.

- **Mendorong pembentukan rumah edukasi anti narkoba di setiap kota/kabupaten**

Sebagai bagian dari kampanye gerakan anti narkoba, BNN akan mendorong pembangunan rumah edukasi anti narkoba di setiap Kabupaten/Kota dengan menggandeng Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Rumah edukasi gerakan anti Narkoba dapat dipergunakan masyarakat dalam memperoleh informasi yang lengkap mengenai bahaya Narkoba baik tubuh, keluarga, masyarakat dan negara. Selain itu, masyarakat dapat menyelenggarakan aktivitas-aktivitas positif yang inspiratif, pengembangan potensi dan kemampuan, dan menjadi pusat pendidikan karakter.

- **Mendorong pembentukan desa bersinar**

Pembentukan desa bersinar merupakan salah satu amanat dari Inpres No 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi P4GN dan PN Tahun 2020 – 2024. Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam RPJMD tahun 2019 - 2023 merencanakan pembentukan desa bersinar sebanyak 10 desa setiap tahunnya. BNN bersama dengan Pemerintah Provinsi perlu mendorong terwujudnya desa bersinar tersebut dan diprioritaskan pada daerah rawan dan rentan narkoba di Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya BNNK Sumbawa dan Pemerintah Daerah perlu mendorong desa/kelurahan di Kabupaten Sumbawa untuk mengalokasi anggaran P4GN dalam APBDes-nya serta meningkatkan pendampingan pembentukan desa bersinar. Provinsi NTB memiliki 1.146 desa/kelurahan.

- **Inovasi dalam kampanye / sosialisasi anti narkoba**

Kampanye / sosialisasi anti narkoba perlu terus dilakukan inovasi seperti dengan penggunaan media sosial, vlog, lomba poster anti narkoba, cerdas cermat anti narkoba, cipta lagu anti narkoba lomba pembuatan film pendek atau vlog. Inovasi dapat diarahkan kepada pendekatan TIK mengingat jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat.

- **Penguatan peran serta masyarakat**

Salah satu kendala yang dihadapi dalam penanganan masalah narkoba adalah masih rendahnya peran serta masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran serta masyarakat adalah melalui pemberdayaan masyarakat, dalam bentuk :

- 1) Pembinaan teknis Pemberdayaan Masyarakat anti Narkoba.
- 2) Bimbingan teknis Pemberdayaan Masyarakat anti Narkoba.
- 3) Pengidentifikasian dan pengembangan potensi sumber daya stakeholder dan masyarakat dalam rangka mendukung P4GN.
- 4) Peningkatan kuantitas dan kualitas penggiat dan relawan anti narkoba.
- 5) Fasilitasi dan dukungan pembinaan masyarakat anti Narkoba.

Siklus selanjutnya dalam penanganan permasalahan narkoba adalah rehabilitasi penyalah guna dan atau korban penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Dalam hal ini BNN Kabupaten Sumbawa mendapatkan mandat khusus untuk melaksanakan penguatan lembaga rehabilitasi disamping juga dapat menyelenggarakan layanan rehabilitasi itu sendiri.

BNN Kabupaten Sumbawa berupaya melakukan penguatan kepada lembaga rehabilitasi baik pemerintah maupun komponen masyarakat dengan berbagai pendekatan. Diantaranya upaya pemetaan, monitoring dan evaluasi perkembangan lembaga rehabilitasi. Bimbingan teknis dan pelatihan tenaga rehabilitasi juga terus dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan lembaga rehabilitasi kepada masyarakat.

Meskipun secara kuantitatif upaya penguatan lembaga rehabilitasi telah meningkat namun dari sudut pandang kinerja kelembagaan menunjukkan bahwa upaya penguatan lembaga rehabilitasi masih belum optimal dan perlu ditingkatkan.

Capaian kinerja BNN Kabupaten Sumbawa secara keseluruhan atas arah kebijakan dan strategi dalam Renstra BNN RI Tahun 2015-2019 menunjukkan hasil yang baik. Begitu pula aspirasi masyarakat yang ditunjukkan dalam hasil survei atas pelayanan BNN Kabupaten Sumbawa

kepada stakeholders menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun, walaupun ada beberapa hal yang diharapkan lebih ditingkatkan di masa yang akan datang.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 05 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

BAB II
RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN
BNN KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2023

Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB menetapkan rencana kinerja Tahun 2023 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja BNN Tahun 2023. Rencana kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa sebagai gambaran pelaksanaan program kerja BNN dalam satu tahun kedepan di wilayah Kabupaten Sumbawa. Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan BNN Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 sebagai berikut.

| NO | KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET KINERJA | KEBUTUHAN PENDANAAN |
|-----------|-------------------------------------|--|---|-----------------------|----------------------------|
| 1. | Pengelolaan Informasi dan Edukasi | Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika | Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah Kabupaten | 10 Orang | 65.000.000 |
| 2. | Penyelenggaraan Advokasi | Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika | Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah Kabupaten | 5 Keluarga | 40.000.000 |
| 3. | Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat | Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN | Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Kabupaten | 2 Lembaga | 216.570.000 |

| NO | KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET KINERJA | KEBUTUHAN PENDANAAN |
|-----|--|---|--|----------------|---------------------|
| 4. | Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah | Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi | Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih | 5 Orang | 11.400.000 |
| 5. | Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat | Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika | Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Kabupaten | 4 Lembaga | 150.935.000 |
| | | | Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Kabupaten | 2 Unit | |
| | | | Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNK | 3,3 | |
| 11. | Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN | Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien | Nilai Kinerja Anggaran BNNK | 91 | 47.712.000 |
| 12. | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan | Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNK | 95 | 131.626.000 |

*) Indikator Kinerja yang dimandatkan pada beberapa BNN Kabupaten Sumbawa

BAB III

PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan BNN Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 merupakan rincian dari Rencana Program Jangka Menengah BNN Kabupaten Sumbawa tahun 2020-2024. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan gambaran arah program kerja dan orientasi kinerja BNN Kabupaten Sumbawa selama satu tahun. Dokumen rencana kinerja tahunan ini akan menjadi rujukan dalam penyusunan rencana kerja anggaran seluruh unit kerja di wilayah Kabupaten Sumbawa, serta dokumen ini juga dapat dilakukan penyesuaian dikemudian hari apabila terdapat kebijakan atau faktor-faktor yang mengharuskan dilakukan penyesuaian adaptasi kebijakan terkait.

Lampiran
Matrik Rencana Volume Rincian Output
Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa
Tahun 2023

| NO | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT | RENCANA VOLUME |
|----|--|---|---|----------------|
| 1. | Pengelolaan Informasi dan Edukasi | Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" | Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk | 10 Orang |
| 2. | Penyelenggaraan Advokasi | Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" | Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba | 5 Keluarga |
| | | | Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa | 2 Desa |
| 3. | Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat | Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" | Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba | 2 Lembaga |
| 4. | Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah | Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih | Petugas pelaksanaan intervensi berbasis masyarakat yg diberikan pelatihan | 5 Orang |
| | | Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis | Tenaga rehabilitasi yg diberikan peningkatan kompetensi teknis | 10 Orang |
| 5. | Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat | 1. Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi 2. Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNK | Layanan rehabilitasi di BNNK/Kota | 25 Orang |
| | | | Layanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN) | 150 Orang |
| | | | Lembaga Rehabilitasi yang Operasional | 2 Lembaga |
| | | | Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional | 2 Lembaga |

| NO | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT | RENCANA VOLUME |
|-----------|--|---|--|-----------------------|
| 6. | Pengelolaan Informasi dan Edukasi | Jumlah kabupaten/kota dengan indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba Kategori "Tinggi" | Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk | 10 Orang |
| 7.. | Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN | 1. Nilai Kinerja Anggaran BNNP 2. Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target | Layanan Perencanaan dan Penganggaran | 1 Layanan |
| | | | Layanan Pemantauan dan Evaluasi | 1 Laporan |
| 8.. | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan | 1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP 2. Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target | Layanan Manajemen Keuangan | 12 Layanan |
| | | | Layanan Perkantoran | 12 Layanan |